

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Landasan Teori

Undang-undang otonomi daerah meletakkan kewenangan sebagian besar pemerintahan bidang pendidikan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembangunan pendidikan yang selama ini didominasi oleh pemerintah pusat terbukti kurang efektif. Otonomi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan memindahkan atau memperbanyak masalah pendidikan yang menjadi beban pemerintahan pusat ke kabupaten / kota. Strategi pembangunan pendidikan yang efektif mutlak diperlukan, yaitu strategi pembangunan yang memberdayakan memberikan kepercayaan yang lebih luas, dan mengembalikan urusan pengelolaan pendidikan ke sekolah.

Peran pemerintah lebih baik ditekankan pada pelayanan agar proses pendidikan di sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Fokus pembangunan pendidikan harus tetap pada apa yang terjadi di sekolah, sebab strategi pembangunan yang tidak fokus pada pemberdayaan sekolah umumnya tidak memberi hasil yang memuaskan (Idris, 2007).

Hasil studi di Meksiko menunjukkan bahwa meskipun sering dibahas tentang pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan murid akan pendidikan, namun pada kenyataannya orang tua tidak diikutsertakan dalam sebagian besar pengambilan keputusan yang dibuat oleh institusi sekolah (Gonzales dan Bordon, 2007).

Orang tua sedikit sekali bahkan hampir tidak mengetahui informasi tentang rencana, kebijakan atau program pendidikan yang ada di sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, maka sudah seharusnya pihak sekolah menyajikan secara transparan setiap kegiatan yang dilakukan yang meliputi manajemen maupun keuangan sekolah. Institusi pendidikan sebagai salah satu organisasi sektor publik dituntut untuk memberikan laporan akuntabilitas kepada *stakeholders*. Dasar akuntabilitas yang dapat dipakai adalah Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 46-48 dan 54. Akuntabilitas pendidikan secara umum dibagi 2 yaitu akuntabilitas pengelolaan dana dan akuntabilitas manajemen pendidikan.

#### 2.1.1.1 Akuntabilitas manajemen

Pendidikan serta untuk menyajikan informasi mengenai apa yang telah dikerjakan Chalos (1997) melakukan penelitian inefisiensi anggaran pendidikan dengan menggunakan DEA. DEA digunakan untuk menentukan klasifikasi kinerja sekolah yang efisiensi dan tidak efisien. Berikutnya, dilakukan pengujian apakah kedua klasifikasi sekolah tersebut mempunyai karakteristik realisasi anggaran yang berbeda secara signifikan. Karakteristik anggaran yang digunakan adalah ukuran anggaran (*budget size*), rasio biaya overhead administrasi, dan proporsi anggaran yang didanai oleh pemerintah daerah (*local revenue*).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi perbedaan karakteristik realisasi anggaran yang signifikan antara sekolah yang efisien dan tidak efisien. Artinya, sekolah yang kinerjanya tinggi diukur dengan efisiensi, cenderung mempunyai rasio *expenditure* yang relatif lebih kecil dalam anggaran, dibanding sekolah yang tidak efisien. Maka, dapat disimpulkan bahwa sekolah yang kinerjanya bagus (efisien) mempunyai strategi biaya lebih efisien dan efektif

(rasio biaya lebih kecil) dibanding dengan sekolah yang tidak efisien. Akan tetapi, penelitian.

Hedges *et al.* (1994) menemukan hasil sebaliknya. Hedges justru membuktikan adanya hubungan positif signifikan antara pengeluaran pendidikan dengan *outcome* siswa. Sekolah yang kinerjanya bagus (efisien), relatif mempunyai rasio *expenditure* yang lebih besar dibanding yang tidak efisien.

Berbeda dengan kedua temuan di atas, Hanushek (1994) menemukan adanya beberapa sekolah mempunyai kebijakan yang efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya, sedangkan beberapa sekolah lain tidak. Sekolah yang tidak efisien cenderung mempunyai kebijakan tidak terarah dan pasti, sehingga kegiatan yang dilakukan tingkat *outcome*-nya rendah. Sebaliknya, sekolah yang efisien mempunyai analisis dan perhitungan kebijakan yang matang, sehingga *outcome* yang dihasilkan lebih optimal. Berbagai penelitian atas kinerja pendidikan di atas menunjukkan adanya inkonsistensi hasil. Perbedaan hasil tersebut disebabkan antara lain oleh *pertama* model pengukuran efisiensi (baik formula maupun pengukuran variabel) yang digunakan berbeda, sehingga penarikan simpulan terhadap efisiensi juga berbeda. *Kedua*, sampel penelitian mempunyai karakteristik obyek yang sangat berbeda, sehingga mempengaruhi hasil pengukuran dan perbandingan dalam penentuan efisiensi. *Ketiga*, desain riset yang digunakan berbeda, beberapa penelitian berbasis angka kuantitatif keuangan (anggaran) dan penelitian lainnya berbasis analisis kualitatif, yaitu melalui penilaian efisiensi dan efektifitas kebijakan. Sehingga, bagi peneliti selanjutnya harus hati-hati termaksud dalam pasal 54 yaitu adanya kesempatan

bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pendidikan. Peran serta tersebut mencakup penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

#### **1.1.1.2 Akuntabilitas dana**

Tertuang dalam Pasal 46-48. Pasal 46 disebut bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu, dalam pasal 47 disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Kedua pasal tersebut secara tegas memaksa pengelola sekolah agar mampu menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang menyatakan bahwa dana pendidikan telah dikelola secara efisien dan adil, serta dilaporkan secara transparan. Dengan demikian, akuntabilitas publik lembaga pendidikan menjadi kewajiban bagi setiap pimpinan lembaga pendidikan kepada *stakeholders*.

PP RI No.48/2008 juga menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 51). Oleh karena itu, sekolah wajib mengelola dana pendidikan yang diterima dengan memenuhi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik (pasal 59). Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas kepada *stakeholders*. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan atau tuntutan dari *stakeholders*. Akuntabilitas ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dalam memilih model dan desain penelitian dalam mengukur dan menentukan tingkat efisiensi dan tidaknya sebuah obyek penelitian terutama organisasi sektor publik. Rencana

merupakan sesuatu yang diperlukan agar suatu kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Perencanaan atas suatu kegiatan dapat dalam bentuk keuangan dan non keuangan, yang keseluruhannya akan dituangkan dalam anggaran. Di dalam anggaran, terdapat uraian tentang rencana - rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Fungsi anggaran secara luas adalah sebagai alat pengendalian mencakup pengarahan / pengaturan orang-orang dalam organisasi atau perusahaan. Oleh karenanya, proses penyusunan anggaran (atau disebut juga penganggaran) merupakan kegiatan yang penting sekaligus kompleks, sebab anggaran mempunyai kemungkinan berdampak disfungsi terhadap perilaku anggota organisasi. Keikutsertaan dalam menyusun anggaran merupakan suatu cara efektif untuk menciptakan keselarasan tujuan setiap pusat pertanggung jawaban dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan dan karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena merasa ikut serta terlibat dalam penyusunan (Milani, 1975). Internalisasi tujuan organisasi oleh para manajer akan meningkatkan efektivitas organisasi, karena konflik potensial antara tujuan individu dengan tujuan organisasi dapat dikurangi dan perlahan - lahan bahkan dapat dihilangkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum suatu organisasi memilih penyusunan anggaran berdasarkan partisipasi pegawai / karyawan. Pihak pimpinan / manajerial harus mengetahui dengan pasti keunggulan dan kelemahan penganggaran yang yang disusun berdasarkan partisipasi dari pegawai / karyawan mereka. Karena jika hal ini

diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan malah akan terjadi inefisiensi anggaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jika menggunakan anggaran yang disusun secara konvensional. Keunggulan yang dapat diperoleh dari penyusunan anggaran berdasarkan partisipasi adalah akan meningkatnya produktivitas karyawan setelah karyawan diijinkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perubahan metode dan tugas (Choch dan French [1948] dalam Herminingsih [2009]). Berdasarkan hasil penelitian, Coch menyarankan bahwa penolakan akan perubahan dapat diatasi dengan digunakannya kelompok diskusi agar manajemen dapat secara efektif mengkomunikasikan pentingnya perubahan dan mendorong kelompok untuk ikut serta merencanakan perubahan. Kinerja para manajer diharapkan akan meningkat dengan menyusun anggaran secara partisipatif.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena merasa ikut serta terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut (Milani, 1975). Internalisasi tujuan organisasi oleh para manajer akan meningkatkan efektivitas organisasi, karena konflik potensial antara tujuan individu dengan tujuan organisasi dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan.

Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran akan melibatkan keberadaan karyawan dan tidak hanya terlibat dalam tugas yang mereka kerjakan saja. Hal ini tentunya akan meningkatkan moral dan menimbulkan inisiatif yang besar di seluruh level

manajer. Dengan ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, para manajer juga akan lebih memahami masalah yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan anggaran. Beberapa hasil penelitian di atas telah mengungkapkan keunggulan dari penganggaran berdasarkan partisipasi karyawan. Namun demikian, sistem penganggaran ini juga memiliki permasalahan atau kelemahan. Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa partisipasi akan memungkinkan terjadinya *slack budget*. Ada kemungkinan bahwa karyawan tidak akan memberikan seluruh informasi yang mereka miliki pada saat perancangan anggaran.

### 1.1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan anggaran dana pendidikan dan ada metode yang berbeda - beda metode perhitungannya, ada yang menggunakan *serve* dan ada yang menggunakan metode langsung. Penelitian tersebut secara ringkas ditampilkan dalam bentuk narasi (deskripsi) dan tabel sebagai berikut :

Wulaningrum (2000) dengan judul “Partisipasi Pegawai Dalam Penyusunan Anggaran Sekolah - Studi Kasus Pada Smp Negeri 10 Samarinda.” Berdasarkan hasil penelitian, Hasil analisis dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa butir pertanyaan yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dari hasil deskripsi variabel penelitian dapat diketahui bahwa terdapat keterlibatan (partisipasi) responden dalam proses penyusunan anggaran sekolah meskipun sangat kecil dan hanya terjadi pada mereka yang memang bertugas dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan peneliti sebelumnya bahwa *Diduga tidak terdapat keterlibatan pegawai dalam penyusunan anggaran sekolah.*



Indarto dan Ayu (2011) dengan judul: “PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PERUSAHAAN MELALUI KECUKUPAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, KOMITMEN TUJUAN ANGGARAN, DAN JOB RELEVANT INFORMATION (JRI)” berdasarkan hasil penelitian penelitian ini dapat didukung. Artinya bahwa dalam sebuah perusahaan, partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran yang didukung oleh kecukupan anggaran, komitmen organisasi, komitmen tujuan anggaran, *job relevant information* yang diterima sesuai dengan harapan seorang manajer akan membuat seorang manajer menciptakan performa yang maksimal sehingga akan memotivasi kerja dari manajer tersebut untuk meningkatkan kinerja manajerialnya.

Fausiyah (2007) dengan judul “PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN (Studi Empiris Pada Lembaga Fungsional Pemerintah Kabupaten Di Madura)” Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh terhadap senjangan anggaran pada lembaga fungsional pemerintah kabupaten di Madura. Pengaruh yang dimiliki adalah pengaruh positif, hal ini berarti bahwa bila partisipasi penyusunan anggaran meningkat maka senjangan anggaran juga meningkat dan bila partisipasi penyusunan anggaran turun maka senjangan anggaran juga turun.

Niswatin yang berjudul “DIMENSI KEPERILAKUAN DARI PENGANGGARAN PARTISIPATIF” berdasarkan hasil penelitian Banyak



penelitian yang telah membuktikan anggaran partisipatif akan meningkatkan partisipasi dari pelaksana, meningkatkan level aspirasi, dan meningkatkan motivasi yang pada akhirnya akan membawa pengaruh positif pada kinerja manajerial, namun untuk menunjukkan adanya hubungan tersebut, Peneliti menggunakan pendekatan yang dijelaskan oleh Govinda rajan untuk menggunakan pendekatan kontijensi dengan cara menggunakan variabel aspek perilaku yang dapat mendukung hubungan tersebut sebagai variabel intervening atau moderating. Beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial

Yuliasuti (2014) yang berjudul **“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) TERHADAP *BUDGETARY SLACK* DENGAN MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”** Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengaruh langsung partisipasi penyusunan APBS terhadap *budgetary slack* adalah positif namun pengaruhnya tidak signifikan, berarti semakin tinggi partisipasi penyusunan APBS mengakibatkan senjangan anggaran semakin tinggi. Partisipasi individu selama proses penyusunan APBS tidak selalu memberikan pengaruh negatif pada senjangan anggaran.

MUTHAHER (2007) yang berjudul **“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH: BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING”** Hasil penelitian ini minimal dapat memotivasi penelitain selanjutnya terutama yang berkaitan dengan

kinerja aparat pemerintah daerah dan dapat merekomendasi bagi dunia praktek organisasi pada umumnya yang berkaitan dengan penerapan partisipasi penyusunan anggaran

### Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

| No | Peneliti            | Judul   | Hasil penelitian  |
|----|---------------------|---|---|
| 1  | Yuliasuti<br>(2014) | PENGARUH PARTISIPASI<br>PENYUSUNAN ANGGARAN<br>PENDAPATAN DAN BELANJA<br>SEKOLAH (APBS) TERHADAP<br><i>BUDGETARY SLACK</i> DENGAN<br>MOTIVASI DAN KOMITMEN<br>ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL<br>PEMODERASI | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi penyusunan APBS berpengaruh positif terhadap <i>budgetary slack</i>. Semakin tinggi partisipasi individu yang terlibat dalam proses penyusunan APBS maka akan semakin tinggi terjadinya senjangan anggaran di sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Magetan.</li> <li>• Motivasi yang tinggi berpengaruh negatif dan signifikan pada hubungan antara partisipasi penyusunan APBS dengan <i>budgetary slack</i>. Semakin tinggi motivasi dalam diri individu yang</li> </ul> |

|   |                        |  |   |
|---|------------------------|--|---|
|   |                        |  | <p>terlibat dalam proses penyusunan APBS akan dapat mengurangi terjadinya senjangan anggaran di sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Magetan.</p>   |
| 2 | Indarto dan Ayu (2011) | <p>PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PERUSAHAAN MELALUI KECUKUPAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, KOMITMEN TUJUAN ANGGARAN, DAN JOB RELEVANT INFORMATION (JRI)</p> | <p>Berdasarkan hasil analisis jalur atau pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui kecukupan anggaran, komitmen organisasi, komitmen tujuan anggaran, <i>job relevant information</i> dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien beta dan signifikansi variabel independen terhadap variabel mediasi serta signifikansi variabel mediasi terhadap variabel dependen yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif.. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan anggaran, komitmen organisasi, komitmen tujuan anggaran, <i>job relevant information</i> dapat berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja</p> |

|   |                 |   |  |
|---|-----------------|---|--|
|   |                 |   | <p>manajerial. Dengan demikian hipotesis alternatif dalam penelitian ini dapat didukung. Artinya bahwa dalam sebuah perusahaan, partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran yang didukung oleh kecukupan anggaran, komitmen organisasi, komitmen tujuan anggaran, <i>job relevant information</i> yang diterima sesuai dengan harapan seorang manajer akan membuat seorang manajer menciptakan performa yang maksimal sehingga akan memotivasi kerja dari manajer tersebut untuk meningkatkan kinerja manajerialnya.</p> |
| 3 | Fausiyah (2007) | <p><b>PENGARUH PARTISIPASI<br/>PENYUSUNAN ANGGARAN<br/>TERHADAP SENJANGAN<br/>ANGGARAN</b></p> <p><b>(Studi Empiris Pada Lembaga<br/>Fungsional Pemerintah Kabupaten<br/>Di<br/>Madura)</b></p> | <p>Dari analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada lembaga fungsional kabupaten di Madura, partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti bahwa apabila partisipasi penyusunan anggaran meningkat maka senjangan juga meningkat begitu pula sebaliknya</p>   |

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
|   |                 |  | <p>apabila partisipasi penyusunan anggaran menurun maka senjangan anggaran juga menurun. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran cukup tinggi, yaitu 62%, akan tetapi besarnya partisipasi penyusunan anggaran maupun senjangan anggaran pada lembaga fungsional pemerintah kabupaten di Madura tidak terlalu tinggi, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang lebih tinggi sedikit saja dibandingkan dengan nilai tengahnya.</p> |
| 4 | MUTHAHER (2007) | <p>PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH: BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING</p> | <p>Faktor budaya organisasi dan komitmen organisasi kemungkinan menjadi faktor kondisional yang harus dipertimbangkan dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi melalui partisipasi penyusunan anggaran. Faktor tersebut penting dalam kondisi era globalisasi yang penuh dengan ketidakpastian lingkungan.</p> <p>Bagaimanapun tingkat kesesuaian faktor budaya dan komitmen organisasi terhadap efektifitas partisipasi</p>                                   |

|   |                    |   |   |
|---|--------------------|---|---|
|   |                    |   | <p>penyusunan anggaran, masih perlu diuji kembali untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian berikutnya, dengan mempertimbangkan pengaruh variabel kontijensi lainnya, seperti pelimpahan wewenang, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, <i>locus of control</i> dan lain-lain.</p> |
| 5 | Wulaningrum (2000) | <p>PARTISIPASI PEGAWAI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN SEKOLAH - STUDI KASUS PADA SMP NEGERI 10 SAMARINDA</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil deskripsi variabel penelitian dapat diketahui bahwa terdapat keterlibatan (partisipasi) responden dalam proses penyusunan anggaran Sekolah</li> </ul>  |
| 6 | Niswatin           | <p>DIMENSI KEPERILAKUAN DARI PENGANGGARAN PARTISIPATIF</p>  | <p>Hubungan antara anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial telah menjadi pusat perhatian para Peneliti untuk melakukan lebih lanjut terhadap hubungan tersebut, beberapa hasil</p>  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |  | <p>penelitian menunjukkan hubungan diantara keduanya tidak dapat disimpulkan secara konklusif, hal ini dipertegas oleh Govindarajan ( dalam Fahrianta dan Ghozali, 2002) bahwa untuk menyelesaikan perbedaan tersebut, dapat dilakukan dengan pendekatan kontijensi, pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel (faktor yang memediasi) yang dapat mempengaruhi hubungan antara anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial.</p> <p>Hal yang perlu dipahami bahwa pengaruh anggaran partisipatif terhadap kinerja sangatlah dipengaruhi oleh aspek berperilaku, diantaranya adalah faktor-faktor motivasi, <i>job relevant information</i>, struktur dan kultur organisasional, komitmen dengan tujuan, sikap, perilaku, dan masih ada faktor-faktor lain. Olehnya, untuk mendukung pencapaian peningkatan kinerja melalui anggaran partisipatif, sangat diperlukan</p> |
|--|--|---|---|



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | pertimbangan dari aspek keperilakuan dalam penyusunan anggaran. |
|--|--|--|---|

### 1.1.3 Kerangka Penelitian

Gambar kerangka penelitian di bawah ini merupakan asumsi dasar peneliti

